

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah secara maksimal maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diberikannya kewenangan yang bebas namun bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus melakukan usaha untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan kewajiban bagi daerah dalam mewujudkan kesiapan daerah dalam mendanai keuangan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi wewenang nya. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan ini terdapat satu persamaan dalam hal anggaran, yaitu setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.(Kosasih,2019:2)

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah

diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. (Siahaan,2010:4)

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Malang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undangundang ini. (Siahaan,2010:6)

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun,

selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. (Siahaan,2010:7)

Pengguna kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil semakin mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya volume kendaraan yang setiap hari memadati jalan raya terutama pada hari kerja efektif. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya jajaran kendaraan yang melakukan parkir liar disepanjang jalan protokol, contohnya di Jl. Pahlawan Trip, di beberapa swalayan, dan di beberapa tempat makan. Dimana kondisi tersebut seharusnya dapat di atasi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai. (Balahmar,2013:168)

Potensi peningkatan retribusi Parkir meningkat disebabkan karena Kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di setiap tahun. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan pusat-pusat pembelanjaan, pembangunan pertokoan, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya Kota Malang sendiri mendapat julukan sebagai kota pendidikan sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat

semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswa baru yang sebagian besar membawa kendaraan pribadi. Retribusi Parkir merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting di Kota Malang.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan mendalami mengenai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari segi retribusi parkir di kota Malang. Maka dari itu peneliti mengangkat judul sebagai penelitian skripsi mengenai **“Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dapat dirumuskan beberapa masalah berdasarkan latar belakang diatas, yaitu :

1. Bagaimana Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah.?
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja yang muncul dalam Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor pendorong serta faktor penghambat yang muncul dalam Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi mengenai retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dalam mengembangkan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu masukan bagi Pemkot Malang khususnya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi parkir di Kota Malang.